



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FADJAR JUDIONO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 646944

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/130 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1250 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/96 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 980 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.750.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG LGX Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP R/A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA CB15A1RRF M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.900.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 46.870.033



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 2.636.520.033

III. HUTANG

Rp. ---
Rp. 2.636.520.033

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.